

PRIORITAS 9	<b>PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA</b>
TEMA PRIORITAS	<i>Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim</i>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Negara Lingkungan Hidup
BEKERJASAMA DENGAN	Menteri Kehutanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Keuangan; Menteri Perdagangan

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
<b>1. PERUBAHAN IKLIM:</b>										
Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana luran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi										
1	<b>Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut</b>									
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 Ha	120.000 Ha	180.000 Ha	240.000 Ha	295.000 Ha	375 *)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	Kemenhut

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
b.	Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut	Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas ekosistem gambut, yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemen PU, Kemenhut, Kementan, dan Pemda	Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi yang terkoordinasi dengan K/L terkait Verifikasi karakteristik ekosistem gambut di 5 provinsi yang terkoordinasi antar K/L terkait	20%	40%	60%	80%	100%	53,0	KLH
				1	8	8	8	8		
<b>2</b>	<b>Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun</b>									
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha	160.000 Ha	320.000 Ha	480.000 Ha	640.000 Ha	800.000 Ha	8,222.5	Kemenhut
			Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha	100.000 Ha	200.000 Ha	300.000 Ha	400.000 Ha	500.000 Ha		
			Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha	1.000 Ha	2.000 Ha	3.000 Ha	4.000 Ha	5.000 Ha		
			Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 Ha	120.000 Ha	180.000 Ha	240.000 Ha	295.000 Ha		
b.	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha	400.000 ha	800.000 ha	1.200.000 ha	1.600.000 ha	2.000.000 ha	6,239.2	Kemenhut
			Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm	100 klpk	200 klpk	300 klpk	400 klpk	500 klpk		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit		
			Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi	4 Prov	8 Prov	16 Prov	22 Prov	32 Prov		
			Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha	50.000 ha	100.000 ha	150.000 ha	200.000 ha	250.000 ha		
			Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten	6 Kab	12 Kab	18 Kab	24 Kab	30 Kab		
			Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	100.000 ha	200.000 ha	300.000 ha	400.000 ha	500.000 ha		
c.	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda	Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	3	3	3	3	3	143,3	KLH
			Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	8	8	8	8	8		
			Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpolensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan ( <i>land</i>	100%	100%	100%	100%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			<i>use change</i> ) melalui Program Menuju Indonesia Hijau							
			Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana	10	15	20	25	30		
			% rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya	50%	50%	50%	50%	50%		
c.	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L	% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	16,7%	41,7%	58,3%	83,3%	100%	95,7	KLH
			% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	20%	40%	60%	80%	100%		
			% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L	0	25%	50%	75%	100%		
			% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait	0	25%	50%	75%	100%		
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11	6,7%	26,7%	46,7%	66,7%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah							
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	0	25%	50%	75%	100%		
			Jumlah provinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang dan kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014	2	33	33	33	33		
			% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]	10%	33%	55%	78%	100%		
d.	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah	Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	745,46	KKP
			Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis		
3	Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana luran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi									

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha	160.000 Ha	320.000 Ha	480.000 Ha	640.000 Ha	800.000 Ha	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	Kemenhut
			Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha	100.000 Ha	200.000 Ha	300.000 Ha	400.000 Ha	500.000 Ha		
			Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha	1.000 Ha	2.000 Ha	3.000 Ha	4.000 Ha	5.000 Ha		
			Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 Ha	120.000 Ha	180.000 Ha	240.000 Ha	295.000 Ha		
b.	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda	Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	3	3	3	3	3	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	KLH
			Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang diseminasi ke K/L dan daerah terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	8	8	8	8	8		
			Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait	80%	80%	80%	80%	80%		
			Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan ( <i>land</i>	100%	100%	100%	100%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			<i>use change</i> ) melalui Program Menuju Indonesia Hijau							
			Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana	10	15	20	25	30		
			% rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya	50%	50%	50%	50%	50%		
c	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L	% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	16,7%	41,7%	58,3%	83,3%	100%	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 1.2	KLH
			% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L	20%	40%	60%	80%	100%		
			% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L	0	25%	50%	75%	100%		
			% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait	0	25%	50%	75%	100%		
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11	6,7%	26,7%	46,7%	66,7%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah							
			% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah	0	25%	50%	75%	100%		
			Jumlah provinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang dan kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014	2	33	33	33	33		
			% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]	10%	33%	55%	78%	100%		
d.	Penguatan Kebijakan Iptek dan Dukungan Litbang untuk Penurunan Emisi gas CO2 dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kebijakan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kebijakan	5	5	5	5	5	49,00	KRT
			Jumlah riset bersama	5	5	5	5	5		
<b>2. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN:</b>										
Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya										
1	Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri									



No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
	dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut;									
a.	Pengendalian Pencemaran Air	Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	205	210	215	220	142,0	KLH
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	220	225	235	245		
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	296	310	320	330		
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	555	606	660	720		
			Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan	20	20	20	20	20		
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	6	6	6	6		
b.	Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	205	210	215	220	120,84	KLH
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	220	225	235	245		
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	296	310	320	330		
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	555	606	660	720		
			Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%		
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	6	6	6	6		
c.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	Meningkatnya kebijakan dan penataan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]	1	1	1	1	1	106,0	KLH
			Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3	1	1	1	1	1		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas							
			Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja pnaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	200	205	210	215	220		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	5	10	10	10	10		
			Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada	3	4	4	4	4		
d.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agro industri dan Jasa	Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan pnaatan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa	Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]	2	2	2	2	2	107,83	KLH
			Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	480	516	535	555	575		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa	5	10	10	10	10		
			Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	4	4	4	4	4		
e.	Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Meningkatnya pnaatan pengelolaan bahan dan limbah B3	Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]	2	3	3	3	3	88,80	KLH

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			Jumlah propinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi, pengelolaan B3 dan limbah B3	5	33	33	33	33		
			Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	4	4	4	4	4		
f.	Penelitian Oseanografi	Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang	Paket informasi dasar	3	3	3	3	3	70,40	LIPI
<b>2</b>	<b>Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun</b>									
a.	Pengendalian kebakaran hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.	20%	36%	48,8%	59,2%	67,2%	1.275,00	Kemenhut
			Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008	10%	20%	30%	40%	50%		
b.	Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Tersedianya kebijakan, data dan informasi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terpadu dan terkoordinasi dengan K/L terkait	Tersedianya data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasikan ke K/L dan daerah terkait, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan mekanisme pencegahan kebakaran hutan	80%	80%	80%	80%	80%	31,96	KLH
									* Merupakan bagian dari total pagu kegiatan dalam substansi inti 1.2	

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
3	Penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014									
a.	Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	205	210	215	220	* Sudah termasuk dalam substansi inti 2.1	KLH
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	220	225	235	245		
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	296	310	320	330		
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	555	606	660	720		
			Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%		
			Jumlah pedoman teknis/ peraturan perundang-undangan	2	6	6	6	6		
b.	Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di prioritas kota-kota yang dipantau	Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan	2	10	7	10	8	104,8	KLH
			Jumlah daerah (provinsi/ kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak	4	8	8	8	8		
			Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P)	4	8	8	8	8		
			Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, <i>land use planning</i> )	2	2	2	2	2		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya	16	20	24	28	36		
			Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak	5	5	5	5	5		
c.	Pengendalian Pencemaran Air	Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi	200	205	210	215	220	* Sudah termasuk dalam substansi inti 2.1	KLH
			Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi	220	220	225	235	245		
			Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi	260	296	310	320	330		
			Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH	480	555	606	660	720		
			Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan	20	20	20	20	20		
			Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan	2	6	6	6	6		
d.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	Meningkatnya kebijakan dan penataan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]	1	1	1	1	1	* Sudah termasuk pagu 2.1	KLH
			Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	1	1	1	1	1		
			Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penataan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	200	205	210	215	220		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas	5	10	10	10	10		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada	3	4	4	4	4		
e.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agro industri dan Jasa	Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penataan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa	Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]	2	2	2	2	2	* Sudah termasuk pagu 2.1	KLH
			Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	480	516	535	555	575		
			Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa	5	10	10	10	10		
			Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)	4	4	4	4	4		
f.	Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Meningkatnya penataan pengelolaan bahan dan limbah B3	Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]	2	3	3	3	3	* Sudah termasuk pagu 2.1	KLH
			Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			Jumlah propinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi, pengelolaan B3 dan limbah B3	5	33	33	33	33		
			Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh	4	4	4	4	4		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			ketentuan Internasional yang ada)							
g.	Penanganan Kasus Lingkungan	Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan	% pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung	100%	100%	100%	100%	100%	89,65	KLH
			% dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]	80%	85%	90%	95%	100%		
			% penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]	80%	85%	90%	95%	100%		
			Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi	2	4	4	4	4		
h.	Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah penerimaan target program pinjaman lunak terhadap % jumlah UMKM yang mengajukan permohonan pinjaman	90%	90%				96,5	KLH
			% telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis pinjaman lunak lingkungan (90-100 proposal per tahun)	80%	80%					
			% jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat pinjaman yang sudah jatuh tempo	80%	80%	80%	80%	80%		
			Jumlah pedoman dan fasilitas teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH	5	5	6	6	6		
			Jumlah dokumen tentang bahan rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan	4	4	4	4	4		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			% Bimbingan teknis pengembangan instrument ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah iklim	100%	100%	100%	100%	100%		
i.	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan	Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan	280 kapal	880 kapal	1.480 kapal	2.080 kapal	2.680 kapal	170,10	KKP
j.	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak	Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran	4 wilayah	9 wilayah	15 wilayah	21 wilayah	27 wilayah	86,95	KKP
4	Penghentian kerusakan lingkungan di 13 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya									
a.	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas	Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS	22 DAS	44 DAS	66 DAS	88 DAS	108 DAS	721,9	Kemehut
b.	Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut	Tersedianya perangkat kebijakan	% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/ kota	25%	25%	20%	20%	10%	97,54	KLH



No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		pengelolaan kualitas air yang terpadu dan bersifat lintas K/L	untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/ kota di 13 DAS yang terkoordinasi dengan K/L terkait	20%	20%	20%	20%	20%		
<b>3. SISTEM PERINGATAN DINI:</b>										
Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013										
a.	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim	50%	60%	70%	75%	80%	899,67	BMKG
				50%	60%	70%	75%	80%		
				50%	60%	70%	75%	80%		
b.	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami	Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami	100%	100%	100%	100%	100%	515,04	BMKG
				90%	90%	90%	80%	80%		
				90%	90%	90%	90%	90%		
c.	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim	Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara % pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	75%	85%	90%	95%	95%	151,55	BMKG
				75%	80%	85%	90%	90%		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
d.	Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan	Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan	Peta Resmi tingkat peringatan tsunami	2	2	3	4	5	1.9	Bakosurtanal
<b>4. PENANGGULANGAN BENCANA:</b>										
Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia										
1	<b>Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi</b>									
a.	Pengendalian Kebakaran Hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS	6 DAOPS	12 DAOPS	18 DAOPS	24 DAOPS	30 DAOPS	*)Sudah termasuk dalam substansi inti 2.2	Kemehut
b.	Penyiapan Peralatan dan Logistik Dikawasan Rawan Bencana	1. Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 2. Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana	1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 2. Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana	16 Prov	17 Prov	17 Prov	77 kab/kota	77 kab/kota	230,18	BNPB
		1. Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 2. Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana	1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 2. Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana	16 Prov	17 Prov	17 Prov	77 Kab/ Kota	77 Kab/ kota	144,82	

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
c.	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan	Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.	60 Ha	1.000 Ha	1.100 Ha	1.400 Ha	1.440 Ha	404,6	KKP
			Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan							
			BMKT (kapal)	2	3	3	2	2		
			Garam (ribu ton)	50	100	150	100	100		
			Deep sea water (ribu liter)	200	500	1500	2000	3000		
d.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut	Wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya	Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya	3	3	3	3	3	260,8	KKP
			Jumlah paket data terkait fenomena alam dan sumberdaya nonhayati	1 paket data terkait fenomena alam, dan 5 paket data terkait SDNH, pesisir	1 paket data terkait fenomena alam, dan 5 paket data terkait SDNH, pesisir	1 paket data terkait fenomena alam, dan 5 paket data terkait SDNH, pesisir	1 paket data terkait fenomena alam, dan 5 paket data terkait SDNH, pesisir	1 paket data terkait fenomena alam, dan 5 paket data terkait SDNH, pesisir		

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
				dan laut	dan laut	dan laut	dan laut	dan laut		
e.	Pendayagunaan Teknologi dan Pengembangan Kapasitas Untuk Mitigasi Bencana	Kebijakan pendaya-gunaan teknologi mitigasi bencana	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	49,00	KRT
		Tersusunnya <i>Standard Operation Procedure (SOP)</i>	Jumlah SOP	0	0	0	1	1		
f.	Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global	Model fisik kolamkultur penyerap CO2, Penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare	Rekomendasi kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan <i>carbon sink</i> dan <i>pilot plant</i> fotobioreaktor untuk penyerap CO2	1	1	1	1	1	14,85	BPPT
g.	Penelitian Geoteknologi	Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim	Paket pengumpulan data	1					10,00	LIPI
			Paket dokumen ilmiah		Draft I	Draft II	Penyempurnaan	Final		
h.	Penelitian Oseanografi	Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat	Paket	2	2	2	2	2	17,00	LIPI
i.	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Bogor	Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah	Kebun raya (paket kawasan)	2	2	3	3	4	25,00	LIPI
j.	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.	(1) Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, <i>remote sensing</i> , dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional.	25	50	50	50	50	31.9	Bakosurtanal
			(2) Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat.	33 Prov 6 K/L	33 Prov 6 K/L	33 Prov 6 K/L	33 Prov 6 K/L	33 Prov 6 K/L	12.7	

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
k.	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut berupa produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, <i>remote sensing</i> /GIS, dinamika geografis SDA	(1) Jumlah NLP dan tema dan laporan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional	18 NLP (@5 tema) dan 4 dok	18 NLP (@5 tema) dan 4 dok	18 NLP (@5 tema) dan 4 dok	18 NLP (@5 tema) dan 4 dok	18 NLP (@5 tema) dan 4 dok	46.5	Bakosurtanal
			(2) Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	13.3	
l.	Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah.	Tersedianya data dan informasi atlas serta kajian pengembangan wilayah.	(1) Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah.	2	2	2	-	-	93.3	Bakosurtanal
			(2) Jumlah provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumber-daya dan kajian pengembangan wilayah.	14	14	14	14	14	14.5	
m.	Pembangunan Data dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika	Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika	(1) Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem	78	90	90	100	100	40.5	Bakosurtanal
			(2) Jumlah pembangunan stasiun tetap GPS	12	-	10	-	-	7.0	
			(3) Jumlah pembangunan stasiun pasang surut laut	7	-	-	-	-	3.5	
2	<b>Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia</b>									
a	Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	1. Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi	1. Jumlah rencana kontijensi yang tersusun; dan 2. Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB)	5	5	5	10	8	157,64	BNPB

No	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Rp Milyar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		2. Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB)								
b.	Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah	55	80	125	150	175	137,89	BNPB